



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Disusun Oleh:

Maryani Sabtu

21601082231



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Disusun Oleh:

Maryani Sabtu

21601082231



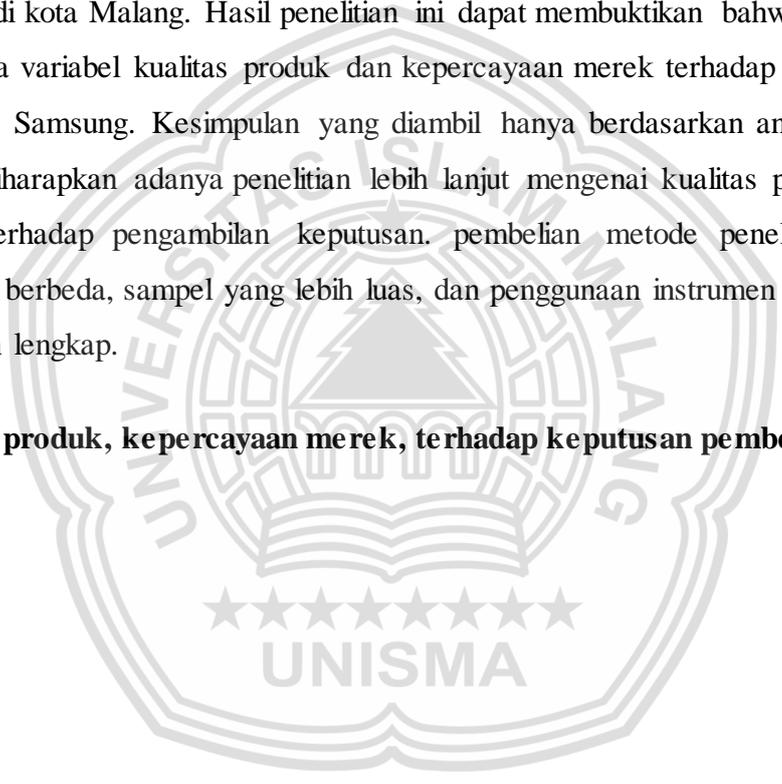
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAK

Besarnya pertumbuhan smartphone di Indonesia tentunya menimbulkan persaingan satu sama lain, misalnya saja smartphone merek Samsung telah menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan jumlah penjualan setiap periodenya. Dalam memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, hal yang menjadi keunggulan kompetitif suatu perusahaan adalah keputusan pembelian konsumennya. Memahami keputusan pembelian konsumen tidaklah mudah karena keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk dan kepercayaan merek. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini melakukan tes terhadap mahasiswa Unisma pengguna smartphone Samsung di kota Malang. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas produk dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan analisis data kuantitatif, sehingga diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai kualitas produk dan kepercayaan merek terhadap pengambilan keputusan pembelian metode penelitian atau metode kualitatif yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

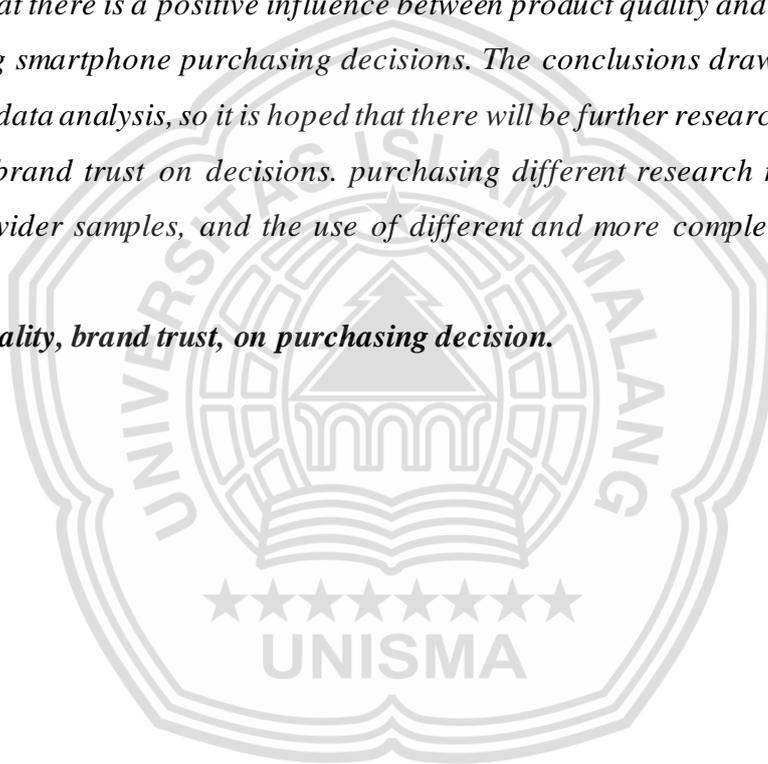
Kata Kunci: kualitas produk, kepercayaan merek, terhadap keputusan pembelian.



ABSTRACT

The large growth of smartphones in Indonesia certainly causes competition with each other, for example, Samsung brand smartphones have used various methods to maintain their existence and increase the number of sales each period. In winning competition in the business world, the thing that becomes a company's competitive advantage is the purchasing decisions of its consumers. Understanding consumer purchasing decisions is not easy because purchasing decisions are influenced by various factors such as product quality and brand trust. In this research, a quantitative approach is used, where this research has conducted tests on Unisma students who use Samsung smartphones in the city of Malang. The results of this research can prove that there is a positive influence between product quality and brand trust variables on Samsung smartphone purchasing decisions. The conclusions drawn are only based on quantitative data analysis, so it is hoped that there will be further research regarding product quality and brand trust on decisions. purchasing different research methods or qualitative methods, wider samples, and the use of different and more complete research instruments.

Keywords: *product quality, brand trust, on purchasing decision.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, karena tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat untuk terwujudnya *good governance*. Hal ini di atur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat dan disajikan oleh pemerintah daerah terkait, pada tahun ke tahun akan diberi pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini. Opini merupakan pernyataan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kualitas serta kewajaran LKPD yang dibuat pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengeluarkan atau memberikan opini diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang bertujuan untuk berpendapat atau beropini terkait dengan kewajaran serta kualitas laporan keuangan yang telah

disajikan, serta mempertimbangkan empat aspek yaitu : (1) efektivitas dari sistem pengendalian internal (SPI), (2) kepatuhan dalam penyajian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) kecukupan informasi dalam pengungkapan (*disclosure*), (4) keselarasan penyusunan laporan keuangan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut BPK, 2014; Indriasih, 2014 hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan 2 (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2014; Indriasih, 2014).

Dalam pelaporan keuangan SDM menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Judisuseno, 2008). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku (Wyatt dalam Ruki, 2003:106; Judisuseno, 2008 dan Irwan, 2011) SDM yang bersangkutan. Granof (2001), Boynton et al (2001), Bastian (2006), Roviyantri (2011) dan Zeyn (2011) juga menegaskan penerapan SAP melalui pengendalian internal yang efektif oleh aparatur yang memiliki kompetensi akan menciptakan laporan keuangan yang andal Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indriasari 2008). Menurut Boyatzis dalam Hutapea dan nurianna Thoha (2008) kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang menghasilkan efektivitas dan atau kinerja yang unggul dalam bekerja. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan akan menimbulkan pemborosan waktu serta tenaga. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka pembuatan laporan keuangan akan tepat waktu. Hal ini karena sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 146).

Standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam pelaporan keuangan juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan daerah agar kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Standar akuntansi pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses 4 pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 13 Tahun 2006 (2006: 76) pasal 232). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU No. 01 Tahun 2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah kabupaten Halmahera tengah pada tahun 2019 mengenai kompetensi sumber daya manusia yang ditemukan di Pemerintah kabupaten Halmahera tengah pada media Halmaherapost adalah kurang kompeten akuntan yang memadai untuk mengelola aset dengan baik seperti permasalahan aset tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian aset, dan pencatatan aset sehingga banyak laporan keuangan dan aset yang menjadi temuan BPK. Selain itu, dari pekerja yang tidak sesuai dengan kompetennya. Adanya lapangan kerja yang dibanjiri tenaga kerja kurang terdidik yang mustahil bisa diserap secara maksimal oleh lapangan pekerjaan yang menghendaki kualifikasi pekerja terdidik. Sumber daya manusia yang paling banyak berada pada Pendidikan SD ke bawah, sehingga secara tidak langsung masyarakat bekerja tidak sesuai tingkat pendidikannya.

Permasalahan lain dilihat dari penerapan standard akuntansi pemerintahan dan penerapan system akuntansi keuangan daerah di Halmahera tengah juga yang di muat dalam media Halmaherapost terjadi adanya pemborosan APBD yang menjadi temuan oleh BPK dalam. Diketahui anggaran tersebut Bupati Halmahera tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penetapan Standar Biaya Lainnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018. Namun, hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban serta permintaan keterangan kepada bendahara pengeluaran dan pelaksanaan perjalanan dinas diketahui terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Enam SKPD. Dengan temuan BPK tersebut, Pemda Kabupaten Halmahera Tengah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), telah menjelaskan akan menerima dan bersedia untuk melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah. BPK telah merekomendasikan agar Bupati Halmahera Tengah memerintahkan Kepala BKP SDM untuk menginstruksikan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas agar mengembalikan sisa kelebihan biaya perjalanan dinas. Fenomena lainnya terkait usulan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 yang dianggap tidak rasional karena angka yang di ajukan sebagai anggaran kurang sesuai dan tidak rasional yang akan berdampak buruk pada beban daerah dan membuat fiscal daerah menjadi tidak sehat. Permasalahan tersebut terlihat bahwa penerapan standard akuntansi pemerintah dan system akuntansi pemerintahan daerah di kabupaten Halmahera tengah kurang baik dan benar. Sehingga perlu adanya perbaikan agar kualitas

laporan keuangan di kabupaten Halmahera tengah tidak dinilai buruk oleh masyarakat Halmahera tengah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, maka laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas dan dapat diandalkan. Terwujudnya laporan keuangan yang andal, informasi keuangan yang dihasilkan harus disajikan secara wajar bebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan.

Selain itu, terdapat permasalahan yang juga terjadi pada wilayah Kabupaten Halmahera yang merupakan salah satu daerah yang sudah 4 tahun ini dimulai dari 2013 hingga 2016 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), hal ini menunjukkan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah belum berkualitas serta masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sumber daya manusia atau pegawai SKPD Kabupaten Halmahera Utara yang bertugas mengelola dan menyusun Laporan keuangan memiliki kompetensi yang masih sangat kurang sehingga menghasilkan Laporan keuangan yang belum berkualitas. dalam mengelola keuangan menjadi salah satu penyebab masih adanya kekurangan atau kelemahan dalam penyajian Laporan keuangan SKPD Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun anggaran 2014-2015 yaitu wajar dengan pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2016 telah mengalami kenaikan tingkat opini yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berarti adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Hasil temuan BPK nomor LHP: 18.a/LHP/XIX.TER/6/2016/tanggal 8 Juni 2016. Pertama, terdapat penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara yang belum dipertanggungjawabkan (Ketekoran kas di bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan bendahara pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa). hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK) terhadap 537 Laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2016, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 375 LKPD (70%), wajar dengan pengecualian (WDP) atas 139 LKPD (26%), dan tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 23 LKPD (4%).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dodopo (2017) memberikan hasil bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern akuntansi, peran internal audit, pendidikan, dan kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki staf keuangan/akuntansi, semakin tinggi pengendalian intern akuntansi, semakin tinggi peran internal audit, semakin tinggi latar belakang pendidikan akuntansi yang dimiliki oleh staf keuangan/akuntansi, dan semakin tinggi kualitas pelatihan yang dimiliki staf keuangan/akuntansi, maka semakin tinggi pula keterandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Peneliti selanjutnya oleh Mene (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini juga menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Halmahera Utara telah didukung teknologi baik software dan hardware dalam hal menjalankan kegiatan organisasinya. Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi

kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Gagali (2019) juga meneliti pada wilayah Halmahera dengan hasil bahwa Komitmen organisasi pemerintah desa, Kompetensi, Peran internal audit secara statistik berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Jika komitmen organisasi pemerintah desa yang dimiliki oleh aparat/pegawai itu tinggi, maka semakin tinggi pula keandalan dari laporan keuangan pemerintah desa yang dihasilkan. Apabila aparat/pegawai pemerintah desa yang mengelola keuangan desa memiliki kompetensi di bidang akuntansi/keuangan maka akan meningkatkan keandalan dari pelaporan keuangan pemerintah desa yang dihasilkan. Peran internal audit dalam hal ini adalah inspektorat daerah kabupaten halmahera utara meningkatkan perannya sebagai APIP maka akan meningkatkan keandalan dari laporan keuangan pemerintah desa yang ada di kabupaten halmahera utara. Peneliti lain Ramdani (2019) dengan hasil bahwa Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan social kepada masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2017 terdapat salasatu jenis pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah, terealisasi kurang dari yang dianggarkan. Selain itu, dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi juga meningkat tajam dibandingkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan juga timbulnya dana cadangan pada tahun anggaran 2017 yang mengakibatkan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah semakin rendah.

Dan hasil penelitian oleh Mitjo (2022) menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan dengan Kualiatas Laporan keuangan SKPD Kabupaten Halmahera Utara dengan tingkat pengaruh kuat dan positif. Dengan adanya kompetensi Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka Kualitas laporan keuangan pemerintah daerahpun akan baik, dikarenakan Sumber daya manusia yang menjadi pegawai mengerti dan memahami standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara diharapkan lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Diseluruh SKPD Kabupaten Halmahera Utara dalam mengelolah keuangan.

Dari hasil pemaparan yang terkait dengan fenomena yang dialami oleh Pemerintah Halmahera tengah untuk melihat adanya hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dieperoleh pada penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah?

- b. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah?
- c. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah?
- d. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh dari Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Halmahera Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

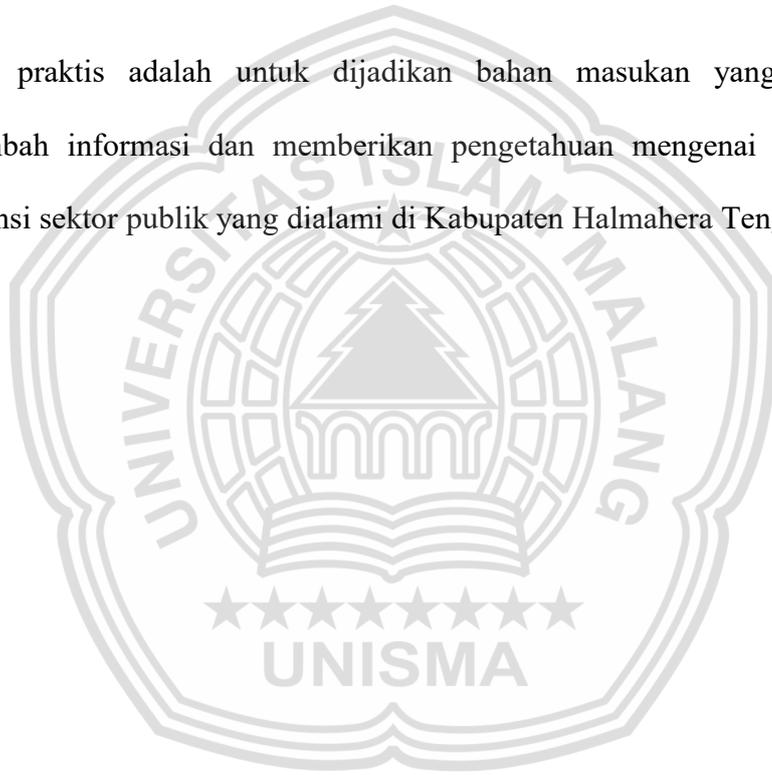
Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai acuan dan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis adalah untuk dijadikan bahan masukan yang dapat menambah informasi dan memberikan pengetahuan mengenai kondisi akuntansi sektor publik yang dialami di Kabupaten Halmahera Tengah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya di dapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (X2) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- c. Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- d. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta Kualitas Laporan Keuangan.
2. Penelitian ini terbatas hanya mengambil data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

5.3 Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini antara lain, adalah:

1. Menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta Kualitas Laporan Keuangan untuk memperkuat hasil analisis penelitian.
2. Menambah jumlah data atau tahun penelitian dan kriteria sampel pada penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Andini, Dewi Dan Yusrawati. 2015. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi*. Vol. 24 No. 1 Juni 2015.
- Apriliani, R. D., Sasana, H., & Panggiarti, E. K. (2021). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Rifka. *JURNAL AKUNTANSI, AUDITING, DAN PERPAJAKAN*, 2(1).
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bodnar, H.G. dan Hopwood, W.S. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Buku I. Edisi Ke-6. Penerjemah Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan. Jakarta: Salemba Empat.
- Dodopo, Y., Sondakh, J. J., & Tinangon, J. J. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, peran Internal Audit, Pendidikan, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kabupaten halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8, 22–31.
- Elfauzi, A. F., & Sudarno. (2019). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Demak). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(59), 1–9.
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Medan: Brama Ardian.
- Fikri, D. A. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol.20.

- Gagali, yakub R. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Kompetensi Dan Peran internal audit terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa dikabupaten halmahera utara. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 144–156.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Indriasari, D. dan Nahartyo, E. 2008. Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir). SNA XI Pontianak
- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Lubis, Putri Syukria. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PD. Pasar Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mitjo, F. S., Kawatu, F. S., & Tangkau, J. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 234–241.
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 133–143.
- Nurlan, Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Nurmalia Hasanah Dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. 2016. Penerbit In Media.
- Putra, B. D., & Amar, S. (2005). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG*.
- Priyatno, Dwi. 2012. *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Jakarta: Mediakom.
- Priyono.2016. *Metode penelitian kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standard
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 (2006: 76) pasal 232
- Pujanira, P., & Abdullah, T. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Jurnal Nominal*, VI(4).
- Putra, B. D., & Amar, S. (2005). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG*.
- Ramdani, M. R. (2019). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 67–72.
- Roviyanti, D. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal SNA*.
- Safridha, M. A. (2020). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)*.
- Sutrisno, Edi. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37.